



SUB BAGIAN HUMAS DAN TUKALAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang 25137 Tlp. 0751-40818 Fax 0751-40811, 40817

Koran		Hlm
Haluan		
Padang Ekspres		
Singgalang	✓	A1-11
Posmetro		
.....		

Tahun : 2016			
Bulan			
Jan	✓	Jul	
Feb		Ags	
Maret		Sep	
April		Okt	
Mei		Nov	
Jun		Des	

Tanggal				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SPJ Fiktif Bernilai Puluhan Miliar di Pemprov Sumbar

Padang, Singgalang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif bernilai miliaran rupiah pada APBD Sumbar. Sekarang dugaan itu sedang dalam proses audit investigasi khusus.

"Benar sekarang dugaan itu juga sedang ditangani Inspektorat Pemprov Sumbar, kita berikan kesempatan bagi BPK untuk melakukan pendalaman dulu," sebut Sekdaprov Ali Asmar didampingi Inspektur Erizal, Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri dan Asisten I, Devi Kurnia dan Kabiro Humas Jasman, kemarin.

Diungkapkannya, dugaan SPJ fiktif tersebut dilakukan oleh seorang staf

berinisial 'JSN' yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasarana dan Tarkim Sumbar.

Saat itu pelaku tidak sedang menjabat eselon, menjabat PPTK. Informasi diperoleh Singgalang, angka SPJ fiktif mencapai Rp40 miliar.

Pelaku diduga melakukan pengandaan SPJ untuk pembebasan lahan bagi pembangunan sejumlah proyek strategis di Sumbar. Diantaranya, pembebasan lahan Jalan Samudera, Pantai Padang. Selain itu juga pada pembebasan lahan *fly over*.

Dengan menggandakan SPJ, anggaran yang seharusnya tidak ada penerima

dibuatkan SPJ tersendiri. Kemudian uang tersebut mengalir ke rekening pribadinya.

Contohnya, jika pada satu kawasan hanya ada 10 orang pemilik, namun dalam SPJ dibuatkan 15 orang. Sehingga sisa lima SPJ dinikmati untuk pribadinya. Kemungkinan perbuatan itu dilakukan tidak hanya dalam satu tahun anggaran.

"Modusnya seperti itu, kita sekarang juga melakukan pendalaman. Apakah pelaku hanya bertindak sendiri atau ada yang lain. Namun sampai saat ini pelaku sudah menandatangani surat pernyataan

Bersambung ke film A-11

SPJ Fiktif ...

bahwa dalam membuat SPJ fiktif tersebut sendiri," ungkap Ali.

Pekerjaan SPJ fiktif tersebut terungkap setelah Gubernur Irwan Prayitno dan Ketua DPRD Sumbar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah APBD Sumbar 2015 pada 25 November 2016.

"Setelah Gubernur menerima laporan tersebut, makanya diminta Inspektorat melakukan pemeriksaan," ungkap Sekda.

Dijelaskannya, sebenarnya secara administrasi apa yang dilakukan oleh JSN tidak ada kesalahan. Semuanya laporan pertanggungjawabannya secara administrasi sudah lengkap.

Namun, kondisi itu ketika dicocokkan di lapangan baru ditemukan kejanggalan. Dari kejanggalan tersebut terus dikembangkan, akhirnya ada banyak SPJ fiktif.

"Jadi seharusnya tidak ada penerima, oleh pelaku dibuatkan ada penerima sendiri," tambahnya.

Menurutnya, untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut, pemprov akan mengajukan JSN untuk disidangkan pada Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP). Kemungkinan sanksi yang akan diberikan berupa hukuman terberat, yakni dipecat dari PNS.

"Kita sekarang lebihutamakan mengembalikan keuangan negara dulu. Nanti soal sanksi tergantung hasil pemeriksaan final oleh Inspektorat dan BPK," timpalnya.

Meski begitu, kata Ali, setelah batas waktu menanggapi hasil LHP BPK habis

60 hari sejak penyerahan ke gubernur, maka penyimpangan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

"Tidak tertutup kemungkinan ke arah sana, namun kita tegaskan, kita utamakan bagaimana mengembalikan kerugian negara akibat ulah JSN tersebut," tegasnya.

Ubah Pergub

Menyikapi hal itu, Gubernur Irwan Prayitno telah melakukan perubahan Peraturan Gubernur 61/2015 tentang Pengangkatan ASN dari Dalam Jabatan Struktural menjadi Pergub 50/2016. Pergub tersebut menegaskan, jika terjadi kesalahan pada bawahan, maka pimpinan akan bertanggungjawab secara bertingkat.

Tujuannya, agar pengawasan terhadap pekerjaan administrasi menjadi lebih teliti. Karena masih ada sejumlah pejabat yang kurang teliti dengan pekerjaan bawahannya.

"Tidak salah gubernur selalu mengingatkan kami, bahwa jangan meng-outsourcing pekerjaan pada bawahan," timpal Kepala Bappeda, Hansastri.

Ciderai WTP

Menyikapi kondisi itu, Ali Asmar juga menyayangkan kondisi tersebut. Karena selama ini pengelolaan keuangan pemprov sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Temuan ini telah menciderai opini WTP yang kita terima selama empat kali berturut-turut," ujarnya.